

hubungan pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Teori keagenan ini menjelaskan hubungan kontraktual antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Pemilik yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Manajer sebagai *agent* bertanggung jawab menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan operasi dan meningkatkan laba perusahaan. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja manajer untuk memastikan operasional perusahaan dikelola dengan baik.

Eisenhard (dalam Arifin, 2005), membagi teori keagenan menjadi 3 (tiga) buah asumsi yaitu: asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*) (Arifin, 2005). Asumsi keorganisasian menjelaskan konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara pemilik perusahaan dan manajemen. Asumsi tentang informasi adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah komoditi.

Informasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah bagi *principal* dalam mengontrol dan memonitor kinerja agen. Dua permasalahan yang muncul akibat asimetri informasi yaitu:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang timbul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian tugas.

Asimetri yang terjadi antara prinsipal dengan agen akan membuka peluang bagi pihak agen untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Ada tiga jenis *agency cost* yaitu:

1. *Monitoring Cost*. Biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor aktivitas agen dengan menetapkan insentif yang layak untuk mencegah penyimpangan aktivitas.
2. *Bonding Cost*. Biaya yang dikeluarkan prinsipal kepada agen untuk membelanjakan biaya sumber daya perubahan yang bertujuan untuk menjamin agar agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal.
3. *Residual Loss*. Merupakan nilai uang yang setara dengan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen yang timbul dari biaya keagenan.

Posisi tawar antara prinsipal dengan agen membuat pengambilan keputusan pada perusahaan seringkali menghasilkan keputusan yang bertolak belakang. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan

sedangkan agen selaku pelaksana operasional perusahaan menguasai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan.

Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling Tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain (Arifin, 2005). Agen berperan sebagai penyedia informasi bagi prinsipal dalam pengambilan keputusan. Agen dapat melakukan upaya sistematis yang dapat menghambat prinsipal dalam pengambilan keputusan strategis melalui penyediaan informasi yang tidak transparan. Sedangkan prinsipal selaku pemilik modal bertindak semaunya ataupun sewenang-wenang karena ia merasa sebagai pihak yang paling berkuasa dan penentu keputusan dengan wewenang yang tak terbatas. Perbedaan cara berpikir antara prinsipal dengan agen yang terjadi menyebabkan pertentangan yang semakin tajam sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan semua pihak (Arifin, 2005).

### **2.1.1 Teori *Stakeholder***

*Stakeholder* pada dasarnya adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2000). Menurut Ghozali dan Chariri (2000) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).

### **2.1.2 Teori *Shareholder***

*Shareholder Theory* menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Jika perusahaan memperlihatkan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan dan lingkungannya, maka *value* yang didapatkan oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan *value* pemegang saham (Smerdon dalam Sutedi, 2011).

## **2.2 *Good Corporate Governance***

Menurut KNKG (2006), *Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan.

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Terdapat lima asas *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006, yaitu :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### 2.3 Struktur *Corporate Governance*

Struktur *governance* dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan (Arifin, 2005). Struktur *governance* diatur oleh Undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas (Arifin, 2005). Salah satu model dalam struktur *governance* adalah model Anglo-Saxon. Struktur *governance* ini terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors* (perwakilan dari para pemegang saham/pemilik), serta *Executive managers* (pihak manajemen sebagai pelaku aktivitas perusahaan).

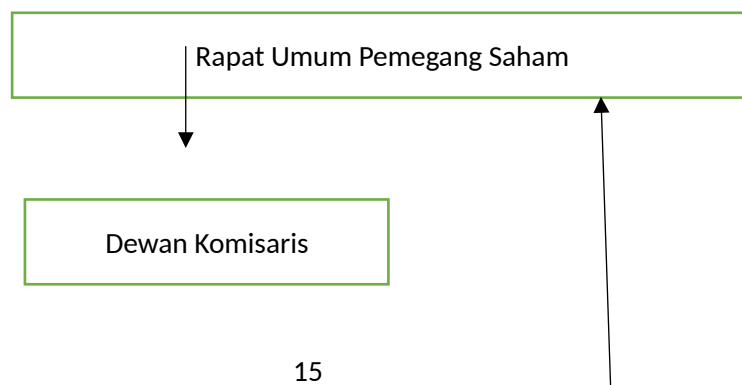
Model Anglo-Saxon ini dikenal dengan *Single-board system* yaitu struktur tata kelola perusahaan yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Pada sistem ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai *board of directors*.

Model *corporate governance* yang lain adalah *Continental Europe*. Dalam struktur ini *governance* terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer Eksekutif (Arifin, 2005). Struktur ini sering disebut sebagai *two board system*, yaitu struktur CG yang memisahkan antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.

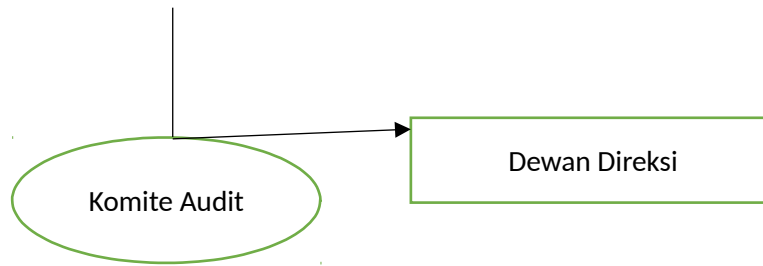
Dalam model *two-board system*, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dapat mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris sebagai atasan langsung dewan direksi mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan

direksi serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan.

KNKG (2006) menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut *two-board system* dimana Dewan komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun, penerapan model *dual board system* di Indonesia berbeda dengan model *Continental Europe*, di mana kewenangan mengangkat dan memberhentikan Direksi berada di tangan RUPS. Hal ini membuat kedudukan Direksi sejajar dengan kedudukan Dewan komisaris. Berikut merupakan struktur *dual board system* yang berlaku di Indonesia. Berikut merupakan bagan struktur *dual board system*.







Gambar 2.1

#### 2.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara para pelaku dalam suatu perusahaan ketika menjalankan peran dan tugasnya. Walsh dan Seward (dalam Arifin, 2005) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan *GCG*, yaitu: (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Struktur memiliki peran penting dalam implementasi mekanisme *Corporate Governance*. Struktur berperan sebagai kerangka dasar tempat diletakkannya sistem dalam penyusunan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan. Struktur *Corporate Governance* merupakan kerangka dasar manajemen perusahaan dalam pendistribusian hak-hak dan tanggungjawab

diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS /pemegang saham).

Arifin (2005) menjelaskan mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang

mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Sedangkan Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pihak diluar perusahaan misalnya pasar. Mekanisme pengendalian internal di dalam *Good Corporate Governance* yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Perusahaan Lain dan Kepemilikan Manajerial. Dan semua itu dilihat dari ukurannya.

#### **2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris**

KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Pemahaman mengenai dewan komisaris juga dapat ditemui dalam Undang–Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat (5) yang menyebutkan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris bertujuan agar pihak manajemen dapat bekerja dengan baik. Fungsi Dewan Komisaris menurut KNKG (2006) sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.
2. Untuk hal yang diperlukan perusahaan, Dewan Komisaris dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada anggota direksi, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.

3. Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
5. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
6. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*).
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus membentuk komite. Usulan komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan.

Ukuran Dewan Komisaris dapat dihitung dengan:

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah Anggota Dewan Komisaris

#### **2.4.2 Ukuran Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi,

penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ukuran dewan direksi dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan direksi pada suatu perusahaan. Menurut KNKG (2006), Dewan Direksi mempunyai beberapa tanggung jawab antara lain:

1. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan dan laporan pelaksanaan GCG.
2. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
3. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.
4. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dana atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan asset perusahaan.
5. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan atas GCG.

Ukuran Dewan Direksi dapat dihitung dengan:

Ukuran Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi

### **2.4.3 Ukuran Komite Audit**

Dalam keputusan Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Dalam pedoman *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek. Perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap

kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan. Ukuran Komite Audit dapat dihitung melalui:

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

#### **2.4.4 Kepemilikan Perusahaan Lain**

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi. Institusi disini bukanlah institusi pendiri perusahaan, melainkan institusi lain di luar institusi pendiri perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun dan lainnya. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (Arifin, 2005). Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja perusahaan khususnya pada kinerja keuangannya. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya manipulasi keuangan oleh manajer yang nantinya akan berpengaruh terhadap laba perusahaan dimana tercermin pada laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, menggunakan kepemilikan perusahaan lain saja. Rumus yang digunakan untuk variable ini adalah:

$$\text{Kepemilikan Perusahaan Lain} = \text{Jumlah Kepemilikan Perusahaan Lain}$$

#### **2.4.5 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu struktur *corporate governance* dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Keterlibatan tersebut akan mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer, komisaris dan direksi perusahaan pada akhir tahun yang kemudian dinyatakan dalam presentase (Wahidahwati, 2002: 607). Rumus yang digunakan untuk variabel ini adalah :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham manajerial}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas Pebankan

Menurut KNKG (2006), tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Dewan Direksi perusahaan. Dewan Komisaris tidak mempunyai otoritas langsung terhadap perusahaan. Namun posisi Dewan Komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan karena fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi atas kinerja Dewan Direksi. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Penelitian yang dilakukan oleh Martsila dan Meiranto (2013) menghasilkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah Dewan Komisaris menyebabkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak manajer, sehingga pihak manajer lebih giat dalam meningkatkan performa badan usaha dan kemungkinan penyelewengan terhadap sumber daya badan usaha rendah.

Dalam penelitian Agustina dan Yulius (2015) menghasilkan dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu ROA. Secara individual, dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Semakin besar dewan komisaris dan kepemilikan manajerial maka tidak mempengaruhi jumlah ROA yang dihasilkan. Menurut dugaan peneliti, hal ini disebabkan karena adanya pihak dari luar yang ikut mengawasi kinerja perusahaan sektor keuangan.

Penelitian Heriyanto dan Mas'ud (2016) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris terbukti positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin banyak



anggota Dewan Komisaris, maka semakin tinggi profitabilitas. Dan sebaliknya, semakin sedikit anggota Dewan Komisaris, maka akan semakin rendah profitabilitas. Maka dari itu, penulis mengambil hipotesis pertama yaitu:

*H1 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan.*

## 2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Perbankan

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Pemisahan peran dewan komisaris dengan dewan direksi membuat dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa Dewan Direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam

perusahaan. Jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Jumlah dewan direksi secara logis akan berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena dengan adanya beberapa anggota Dewan Direksi, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara anggota Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris.

Pada penelitian John (2015) menghasilkan kesimpulan, Dewan Direksi mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian Heriyanto dan Mas'ud (2016) jumlah anggota Dewan Direksi terbukti mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Semakin banyak anggota Dewan Direksi, maka semakin tinggi profitabilitas. Dan sebaliknya, semakin sedikit anggota Dewan Direksi, maka akan semakin rendah profitabilitas. Semakin banyaknya anggota Dewan Direksi, maka dalam perusahaan tersebut semakin banyak pula ahli yang memiliki kemampuan operasional dalam berbagai bidang dan divisi. Sehingga visi misi dan strategi perusahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Maka dari itu penulis mengambil hipotesis kedua, yaitu:

*H2 = Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan.*

### 3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Profitabilitas Perbankan

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan

tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan *principal* dalam sebuah perusahaan.

Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Peran komite audit yang sangat penting ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan peningkatan kinerja perusahaan maka diharapkan profitabilitas perusahaan dapat naik.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Helfina, Rustam, dan Dwiatmanto (2016), Komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Menurut Narwal dan Sonia (2015) komite audit secara signifikan negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Istighfarin dan Ni Gusti Putu (2015) komite audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang berikutnya adalah:

*H3 = Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan.*

#### 4. Pengaruh Kepemilikan Perusahaan Lain terhadap Profitabilitas Perbankan

Kepemilikan perusahaan lain adalah kepemilikan saham perusahaan oleh perusahaan lain. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Menurut Mirawati (2014), struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan penelitian Diana Istighfarin dan Ni Gusti Putu Wirawati pada tahun 2015 mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Maka dari itu penulis mengambil hipotesis pertama, yaitu:

*H4 = Kepemilikan perusahaan lain berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan.*

#### 5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Profitabilitas Perbankan

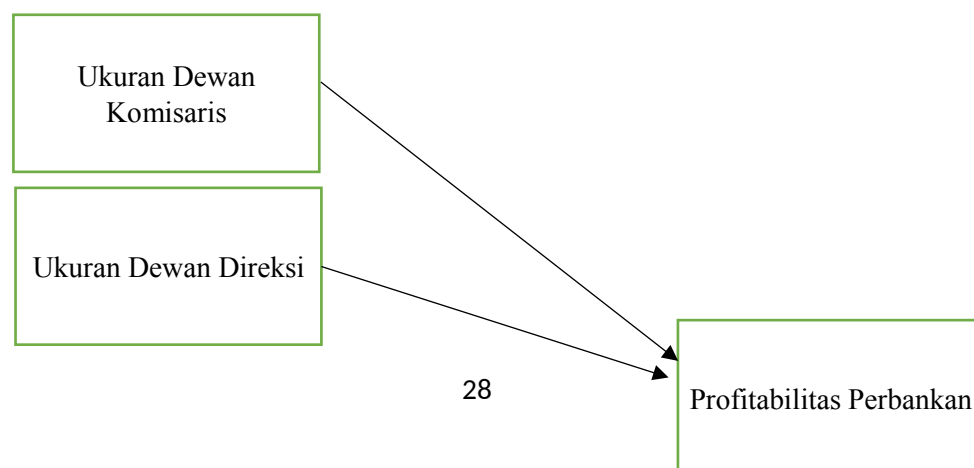
Kepemilikan manajerial merupakan salah satu struktur corporate governance dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam

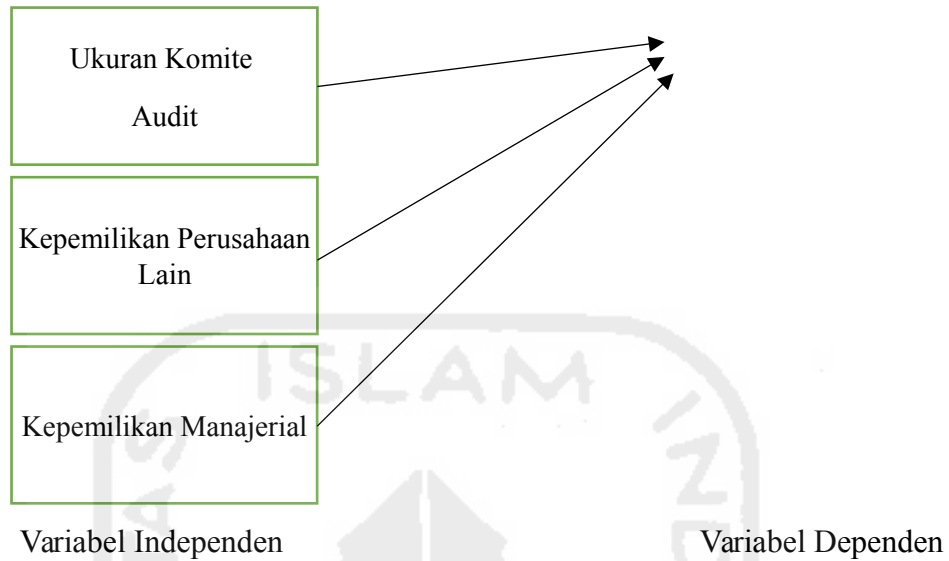
kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Keterlibatan tersebut akan mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer, komisaris dan direksi perusahaan pada akhir tahun yang kemudian dinyatakan dalam presentase (Wahidahwati, 2002: 607). Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Mirawati, 2014).

Berdasarkan penelitian Melia dan Christiawan (2015) mendapatkan hasil bahwa dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu ROA. Secara individual, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Maka dari itu penulis mengambil hipotesis kedua, yaitu:

*H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan.*

## 2.6 Kerangka Konsep Penelitian





Gambar 2.2

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah ruang lingkup atau ukuran karakteristik dari seluruh subjek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2015.

Sampel adalah ukuran karakteristik dari sebagian populasi yang memiliki karakteristik yang sama. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yaitu pemilihan saham perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan terdaftar di BEI yang menyajikan laporan keuangan yang menampilkan ROA (Return on Asset) sebagai proksi dari profitabilitas secara lengkap dari tahun 2011-2015.
2. Perusahaan menyajikan data mengenai *Good Corporate Governance* dan komposisi keanggotaan secara lengkap Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Perusahaan Lain dan Kepemilikan Manajerial secara lengkap dari tahun 2011-2015.

Dari populasi tersebut, sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan tersebut terdiri atas 21 bank yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Nama-nama Bank tersebut adalah;

1. Bank Bukopin (BBKP)
2. Bank Negara Indonesia (BBNI)
3. Bank Rakyat Indonesia (BBRI)
4. Bank Mandiri (BMRI)
5. Bank Mega (MEGA)
6. Bank Sinar Mas (BSIM)
7. Bank Central Asia (BBCA)
8. Bank Capital Indonesia (BACA)
9. Bank Nusantara Parahyangan (BBNP)
10. Bank MNC International (BABP)
11. Bank J Trust (BCIC)
12. Bank Pembangunan Daerah Banten (BEKS)
13. Bank Jabar Banten (BJBR)
14. Bank Qatar Nasional (BKSW)
15. Bank Victoria International (BVIC)

16. Bank Artha Graha International (INPC)
17. Bank Mayapada (MAYA)
18. Bank Windu Kentjana International (MCOR)
19. Bank Panin (PNBN)
20. Bank Bumi Artha (BNBA)
21. Bank CIMB Niaga (BNGA)

### **3.2. Data dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) didokumentasikan dalam [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan yang diukur melalui ROA, sedangkan variabel independennya adalah GCG yang diukur melalui Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Perusahaan Lain dan Kepemilikan Manajerial.

#### **3.3.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan. Besarnya profit perusahaan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan pengukuran atas prestasi perusahaan yang timbul akibat proses pengambilan keputusan manajemen. Penelitian ini menggunakan ROA (*Return on Assets*) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Menurut I Made Sudana (2011, hal 22) mengemukakan bahwa “Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak”.



Maka dari itu, Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yaitu, Menurut Lukman Syamsuddin (2009, hal 63) :

$$ROA = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memeberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. Pada penelitian ini, GCG diukur dari ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial.

#### 3.3.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan perbandingan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Rumus untuk menghitung ukuran dewan komisaris sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

#### 3.3.2.2 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi diukur melalui jumlah seluruh anggota dewan direksi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian.

$$\text{Ukuran Dewan Direksi} = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}$$

#### 3.3.2.3 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit tentu akan lebih baik bagi perusahaan (Wicaksono, 2012). Hal tersebut menunjukkan pengawasan yang lebih maksimal. Pada penelitian ini, ukuran komite audit diukur dengan membandingkan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung ukuran Ukuran Komite Audit sebagai berikut:

Ukuran Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit

#### **3.3.2.4 Kepemilikan Perusahaan Lain**

Kepemilikan perusahaan lain diukur dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan lain. Rumus yang digunakan untuk variable ini adalah:

Kepemilikan perusahaan lain = jumlah kepemilikan perusahaan

#### **3.3.2.5 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial dilihat dari seberapa banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh seorang manajer perusahaan. Rumus yang digunakan untuk variabel ini adalah:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham manajerial}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

### **3.4 Alat Analisis**

#### **3.4.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2006).

### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang dilakukan ada empat yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokolerasi dan uji heterokedastisitas.

#### **3.4.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah yang terdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Pengujian normalitas dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  atau 5% maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  atau 5% maka data tidak terdistribusi normal.

#### **3.4.4.2 Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya

multikolonieritas dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel terdapat nilai korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,95), maka hal ini merupakan indikator adanya multikolonieritas. Mengamati nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$  (Ghozali, 2006).

#### **3.4.4.3 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada permasalahan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena ada observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 ( $DW < -2$ )
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau  $DW > +2$  (Danang Sunyoto, 2011).

#### 3.4.4.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Scatter Plot* yang menyatakan bahwa model regresi linier berganda tidak terdapat heterokedastisitas jika:

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0
- 2) Titik-titik data tidak hanya mengumpul di atas dan di bawah saja
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

#### 3.4.3 Pengujian Hipotesis

##### 3.4.3.1 Regresi Linear Berganda

Guna melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis *multiple regression* (regresi berganda). Adapun persamaan multiple regression untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Model Regresi :

$$ROA = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 KP + \beta_5 KM + e$$

ROA : kinerja perusahaan *i* tahun ke-*t* yang diukur menggunakan ROA

$\alpha$  : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  : koefisien regresi

DK : Ukuran Dewan Komisaris perusahaan *i* tahun ke-*t*

DD : Ukuran Dewan Direksi perusahaan *i* tahun ke-*t*

KA : Ukuran Komite Audit perusahaan *i* tahun ke-*t*

KP : Ukuran Kepemilikan Perusahaan Lain *i* tahun ke-*t*

KM : Ukuran Kepemilikan Manajerial perusahaan *i* tahun ke-*t*

*e* : error

Setelah persamaan regresi terbebas dari asumsi klasik maka langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini meliputi:

#### **3.4.3.2 Uji Statistik T**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen dan independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Sedangkan bila nilai signifikansi lebih dari 0,05 variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **3.4.3.3 Uji Statistik F**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).